

VI. PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI JAWA TENGAH

Ketimpangan pembangunan antara desa sebagai produsen pertanian dengan kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong aliran sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara tidak seimbang. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan adalah konsep agropolitan. Agropolitan menjadi relevan diterapkan di Indonesia karena pada umumnya sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan.

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dengan kota (Deptan, 2002). Wujudnya yaitu dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan), dan terdesentralisasi (wewenang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat). Pada wilayah agropolitan, masyarakat diharapkan berperan aktif, sementara fungsi pemerintah adalah sebagai penyedia fasilitas (fasilitator) dengan fokus pemberdayaan (Deptan, 2003).

Permasalahan yang muncul dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan adalah kesenjangan antara kebijakan strategis dan penerapannya di lapangan, khususnya meliputi aspek manajemen, agribisnis dan hukum. Kesenjangan di bidang manajemen berupa kesenjangan antara kebijakan di pemerintah pusat dan di daerah, kesenjangan antar instansi yang berkait dengan masalah pertanian/agribisnis. Kesenjangan di bidang agribisnis berupa kesenjangan antara kondisi agribisnis yang di cita-citakan pemerintah dengan kenyataan kondisi agribisnis di lapangan. Sedangkan

kesenjangan di bidang hukum berupa kesenjangan antara landasan hukum pengembangan kawasan agropolitan di pusat dan di daerah.

Pengembangan Kawasan Agropolitan sebaiknya berbasis pada peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan yang dikembangkan dalam kegiatan agribisnis. Perlu komitmen kuat pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pendukung guna mempercepat berkembangnya Kawasan Agropolitan. Pengembangan Kawasan Agropolitan sangat perlu bagi Negara Agraris seperti Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Agribisnis adalah berbagai jenis kegiatan yang berkait dengan pertanian dari hulu hingga ke hilir, termasuk kegiatan penunjangnya sedangkan agropolitan adalah kawasan dimana kegiatan agribisnis tersebut berkembang. Kawasan Agropolitan merupakan kota pertanian mandiri, yang mencukupi sendiri semua kebutuhan agribisnis dalam kawasan yang bersangkutan pada skala terbatas. Kehidupan masyarakatnya seperti di kota, meskipun terbatas dan dalam lingkungan agribisnis dengan kehidupan ekonomi yang bergairah. Pada kawasan tersebut terdapat komoditas unggulan, yang dikembangkan dalam berbagai sentra kegiatan produksi, pengoiahan, distribusi, dan usaha agribisnis, serta usaha penunjang lainnya, sehingga mendorong kawasan tersebut berkembang menjadi Kawasan Agropolitan.

Pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Tengah telah dimulai sejak tahun 2003/2004 di Kabupaten Semarang dan Pemalang. Tahun 2005 kemudian berkembang menjadi 6 kabupaten yaitu Magelang, Wonosobo, Batang dan Purbalingga, dan kemudian menjadi 8 kawasan di tahun 2007 karena ada tambahan Kabupaten Boyolali dan Karanganyar. Tahun 2008 bertambah lagi menjadi 10 kawasan dengan penambahan pada Kabupaten Brebes dan Banjarnegara sehingga saat ini berjumlah 10 Kabupaten. Untuk tahun 2010 ini beberapa kabupaten berinisiasi mengembangkan kawasan agropolitan yaitu Purworejo, Temanggung,

Banyumas, Pekalongan, Demak dan Cilacap. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka Kabupaten Semarang telah dinobatkan sebagai Kota Agropolitan pertama di Jawa Tengah, karena potensi agribisnis yang dimiliki kabupaten ini sangat besar. Aneka sarana penunjang untuk menggerakkan sektor agribisnis di kabupaten ini dinilai lengkap, seperti :

1. Terminal Agribisnis di Desa Jetis Kecamatan Ambarawa;
2. Perluasan pasar sayur-mayur Jimbaran;
3. Laboratorium sayur maupun buah-buahan, dan;
4. Modernisasi alat-alat pertanian yang dipakai oleh para petani.

Perolehan gelar Kota Agropolitan diberikan oleh Menteri Pertanian dalam acara Penobatan yang dilakukan di Departemen Pertanian, Jakarta. "Penobatan itu merupakan tantangan bagi Kabupaten Semarang untuk menghidupkan sektor agribisnis. Saya bermimpi suatu hari nanti Kabupaten Semarang bisa seperti Thailand, yang sangat maju dalam sektor agribisnis," kata Bambang Guritno, Bupati Semarang saat itu.

A. Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Magelang

Kabupaten Magelang adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah yang terletak diantara Kabupaten Temanggung di sebelah utara, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali di timur, Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo di barat. Ibu kota kabupaten ini adalah Kota Mungkid yang terletak di Kecamatan Mungkid. Kabupaten Magelang cukup terkenal dengan adanya Candi Borobudur, sebuah mahakarya peninggalan Dinasti Syailendra yang kini menjadi kebanggaan Indonesia dan dunia, yang berada di wilayah Kabupaten Magelang.



Gambar 4. Peta Posisi Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang berada di cekungan sejumlah rangkaian pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Boyolali terdapat Gunung Merbabu (3.141 meter dpl) dan Gunung Merapi (2.911 m dpl). Bagian barat (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo) terdapat Gunung Sumbing (3.371 m dpl). Di bagian barat daya terdapat rangkaian Bukit Menoreh. Keseluruhan wilayah terletak pada ketinggian antara 202 m dpl (Kecamatan Ngluwar) sampai ketinggian 1.378 m dpl (Kecamatan Ngablak). Bagian tengah mengalir Kali Progo beserta anak-anak sungainya menuju selatan. Di Kabupaten Magelang terdapat Kali Elo yang membelah dua wilayah ini. Pertemuan kembali kedua titik itu terletak di desa Progowati yang konon dahulu di tempat itu lebih banyak wanitanya dibanding pria.

Secara administratif, Kabupaten Magelang terdiri atas 21 kecamatan, yang dibagi lagi atas 372 desa dan kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Mungkid. Luas keseluruhan wilayah adalah 1.085,73 km² atau 108.573 hektar, atau sekitar 3,34 persen dari wilayah Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk 1.170.894 jiwa (2008) sehingga kepadatan penduduknya sebesar 1.078,44 jiwa/km². Menurut penggunaannya, wilayah Kabupaten Magelang

terdiri atas lahan sawah seluas 37.232 ha (34,29% dari wilayah kabupaten) dan lahan kering seluas 71.341 ha (65,71%). Dari luas lahan sawah yang ada, 23,28 persen berpengairan irigasi sederhana, 22,19 persen sawah tadah hujan, 17,79 irigasi teknis, dan 14,54 persen berpengairan irigasi setengah teknis. Sementara dari lahan kering yang ada, separonya (38,88 persen) dipakai untuk lahan tegalan/kebun/ladang dan sisanya (26,83 persen) dipakai untuk non-pertanian (perumahan, hutan dan lainnya).

Berdasarkan pada kondisi geografi, aktivitas penduduk dan lingkungan, Kabupaten Magelang menetapkan sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan sektor pariwisata sebagai tiga sektor unggulan yang disinergikan. Kolaborasi ketiga sektor tersebut mengilhami gerakan pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan agropolitan di Kabupaten Magelang mulai dilaksanakan tahun 2003 yang terbagi menjadi empat fase. Fase pertama yaitu kawasan agropolitan Merapi-Merbabu tahun 2003-2023, fase kedua adalah kawasan agropolitan Borobudur tahun 2008-2028, fase ketiga kawasan agropolitan Sumbing tahun 2011-2031 dan fase keempat merupakan gabungan semua kawasan yang dimulai tahun 2014.

Kabupaten Magelang merupakan daerah yang cukup terbuka bagi pengembangan investasi pada bidang pertanian dan pariwisata. Sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Magelang, namun daya *competitive advantage* terhadap wilayah *hinterland*nya kurang begitu tinggi. Karakteristik masyarakat Kabupaten Magelang yang masih merupakan masyarakat agraris, yaitu sebesar 57,34% bergerak di sektor pertanian, belum diimbangi dengan peningkatan kemampuan teknis yang baik. Sektor pertanian pada tahun 2001 mampu memberikan kontribusi sebesar 36,27%, namun pada tahun

2002 mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,39% menjadi 34,88%.

Kabupaten Magelang memiliki potensi agro yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan penetapan Kawasan Agropolitan. Potensi tersebut adalah potensi pertanian tanaman bahan makanan utama (padi sawah, padi gogo, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai), tanaman sayur-sayuran (bawang putih, bawang merah, bawang daun, kentang, kobis., petsai/sawi, wortel, dan sebagainya), serta tanaman buah-buahan (alpukat, jeruk, duku/langsat, sawo, durian, mangga, jambu biji, rambutan, salak, melon, pepaya dan semangka). Mulai tahun 2004 program pembangunan pertanian diarahkan untuk berubah dari pertanian yang mengandalkan sumberdaya alam, tenaga murah, subsidi dan rekayasa sosial, menjadi pertanian yang berbudaya industri dan berbasis sistem agribisnis, dalam rangka meningkatkan daya saing, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah agar mampu memberi *multiplier effect* kesejahteraan masyarakat maka Kabupaten Magelang memutuskan bersama masyarakat tani untuk menerapkan konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan mulai tahun 2004, secara bertahap.

Adanya Kawasan Pengembangan Agropolitan ini diharapkan akan terjadi suatu pengembangan kawasan yang berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*) dengan memberikan kemudahan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan agribisnis agar terjadi sinergitas antara potensi lokal dan daya pengembangan tenaga kerja yang mengembangkan komoditi ekspor dengan cakupan kegiatan agribisnis, agribisnis dan agrowisata. Dengan penyebaran kemajuan di perdesaan melalui pengembangan Kawasan Agropolitan ini diharapkan akan dapat mempercepat

terintegrasinya sistem ekonomi kota dan desa. Pengembangan ini diarahkan pada *consumer oriented* melalui sistem keterkaitan desa dan kota.

Sejalan dengan keputusan tersebut, setelah dilakukan analisis dan identifikasi potensi dan permasalahan, dalam pelaksanaan konsep pengembangan Kawasan Agropolitan maka kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Agropolitan Kabupaten Magelang adalah lereng Merapi-Merbabu, yang kemudian disebut sebagai Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu. Kawasan ini meliputi kawasan dari 7 kecamatan dengan jumlah desa yang terlibat sebanyak 96 desa dengan luasan sekitar 30% dari luas Kabupaten Magelang. Sebagian besar jenis tanah di lokasi pengembangan kawasan adalah alluvial, latosol, regosol dan andosol. Lokasi kawasan adalah dataran menengah (437 meter dpl) sampai dataran tinggi (1.378 mdpl), dengan sebagian besar wilayahnya berada di atas 500 mdpl sehingga cocok untuk tanaman sayuran.

Dari segi kondisi pertaniannya, sektor basis pertanian yang diharapkan akan menjadi penyumbang terbesar di Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu adalah Kecamatan Dukun. Sejalan dengan hasil analisis Matrik Potensial dan Matrik Fungsional, yang memenuhi kriteria sebagai Kota Tani Utama adalah Kecamatan Dukun, dengan Desa Sewukan sebagai Kawasan Kota Tani Utama. Keberadaan Kota Tani Utama ini akan didukung dengan 4 kota tani yaitu, Kota Tani Sawangan, Kota Tani Pakis, Kota Tani Ngablak dan Kota Tani Grabag.

B. Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Wonosobo

Kabupaten Wonosobo, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah **Wonosobo**. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di timur,

Kabupaten Purworejo di selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di utara. Sebagian besar wilayah **Kabupaten Wonosobo** adalah daerah pegunungan. Bagian timur (perbatasan dengan Kabupaten Temanggung) terdapat dua gunung berapi: Gunung Sindoro (3.136 meter) dan Gunung Sumbing (3.371 meter). Daerah utara merupakan bagian dari Dataran Tinggi Dieng, dengan puncaknya Gunung Prahu (2.565 meter). Di sebelah selatan, terdapat Waduk Wadaslintang.



Gambar 5. Peta Lokasi Kabupaten Wonosobo

Kata Wonosobo berasal dari bahasa Jawa: **Wanasaba**, yang secara harafiah berarti: "tempat berkumpul di hutan". Bahasa Jawa sendiri mengambilnya dari Bahasa Sanskerta: **vanasabhā** yang artinya kurang lebih sama. Kedua kata ini juga dikenal sebagai dua buku dari Mahabharata: "**Sabhaparwa**" dan "**Wanaparwa**".

Ibukota **Kabupaten Wonosobo** berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten, yang merupakan daerah hulu Kali Serayu. Wonosobo dilintasi jalan provinsi yang menghubungkan Semarang-Purwokerto. **Kabupaten Wonosobo** terdiri atas 15 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Wonosobo. Dengan luas 984,68 km² dan jumlah

penduduk 757.746 jiwa (2008) maka kepadatan menjadi 769,54 jiwa/km².

Pembangunan pertanian di Kabupaten Wonosobo di masa lalu lebih berorientasi pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian yaitu dalam lingkup perbaikan budidaya (*on farm*). Ke depan kebijakan Kabupaten Wonosobo mengarahkan Dinas Pertanian tidak saja berorientasi pada lingkup *on farm*, tetapi juga pada lingkup *off farm*. Kebijakan pembangunan pertanian dimasa lalu yang berorientasi pada *on farm*, relatif berhasil meningkatkan produksi dan kontribusi sektor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian keberhasilan itu hanya dinikmati oleh daerah-daerah yang memiliki kesuburan tanah yang tinggi, memiliki sumber air yang cukup, memiliki komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Daerah tersebut antara lain adalah Kecamatan Kejajar, Kertek dan Mojotengah; sedangkan daerah lain seperti Kecamatan Watumalang, Leksono, Sukoharjo, Kaliwiro dan Wadaslintang kurang menikmati program-program yang berorientasi *on farm* tersebut.

Menarik untuk dikemukakan bahwa kecamatan-kecamatan yang kurang menikmati program-program yang berorientasi *on farm* tersebut (Watumalang, Leksono, Sukoharjo, Kaliwiro dan Wadaslintang) secara mandiri memunculkan unggulan baru atau potensi sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo. Contoh unggulan baru tersebut adalah komoditas salak di Kecamatan Sukoharjo, Duku/Langsep di Kecamatan Leksono, Durian di Kecamatan Selomerto, ternak kambing di Kecamatan Watumalang dan Kaliwiro. Juga perlu dikemukakan bahwa daerah tersebut potensial untuk pengembangan tanaman tropis seperti kelapa, kayu rimba dan empon-empon serta pisang.

Kedudukan Kabupaten Wonosobo terletak pada posisi yang cukup strategis terhadap aspek geografis Provinsi Jawa Tengah. Pada posisi ini antara lain meliputi:

- a. Wilayah Kabupaten Wonosobo terletak diantara Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang. Secara tidak langsung kebijakan tata ruang Kabupaten Wonosobo akan berpengaruh terhadap kabupaten-kabupaten tersebut;
- b. Wilayah Kabupaten Wonosobo dilalui jalan raya yang menghubungkan lalulintas antara daerah Kabupaten yang ada disekitarnya, baik berupa arus barang, manusia maupun jasa sehingga berpengaruh langsung terhadap tata ruang Kabupaten Wonosobo;
- c. Secara geografis Kabupaten wonosobo dilalui jalur perekonomian regional Jawa Tengah. Kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Wonosobo terpengaruh dan mempengaruhi kondisi dan perkembangan perekonomian regional;
- d. Kabupaten Wonosobo berada pada posisi silang antara Temanggung-Wonosobo-Banjarnegara, Wonosobo-Kebumen dan Wonosobo-Purworejo.

Berdasarkan kondisi strategis di atas, maka Kabupaten Wonosobo mempunyai peluang yang besar dalam pengembangan agribisnis. Upaya untuk mengoptimalkan kegiatan agribisnis antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya, penempatan prioritas pembangunan pertanian yang tepat; dan wawasan pembangunan pertanian modern berbasis agribisnis dengan *resourcebase* di wilayah perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui kebijakan daerahnya yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Wonosobo telah menetapkan bahwa pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat serta keseluruhan kekuatan ekonomi daerah terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Penguatan

ekonomi diarahkan dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, mandiri, modern, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Konsep tersebut merupakan konsep yang ideal karena telah mencakup semua prinsip pembangunan dengan prioritas (*leading sektor*).

C. Implementasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Purbalingga

Kabupaten Purbalingga, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat. Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, Kali Pekacangan. Ibukota Kabupaten Purbalingga berada di bagian barat wilayah kabupaten, sekitar 21 km sebelah timur Purwokerto. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah seluas 777,65 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 828.125 jiwa (2008), sehingga tingkat kepadatan penduduknya adalah 1.064,91 jiwa/km². Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Purbalingga.



Gambar 6. Peta Lokasi Kabupaten Purbalingga

Di Purbalingga ada banyak industri dengan bahan baku rambut manusia untuk dijadikan bulu mata palsu (*eye-lash*) atau juga dibuat "wig" atau rambut palsu serta sanggul maupun *hair piece* yang dipasang untuk memberikan tambahan rambut atau juga *high-light* secara temporer di rambut kita. Keistimewaan lain adalah industri knalpot yang merupakan transformasi dari industri kuai dan panci tembaga. Knalpot *Braling* cukup terkenal di kalangan pemilik mobil, sebagai alternatif suku cadang murah.